e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197
Vol. 4, No. 2, Tahun 2026
Hal. 2163-2176
Available online at http://www.journal.lembagakita.com/index.php/ljit

Mobilisasi Identitas Perempuan Kepala Keluarga dan Respons Kebijakan Pemerintah Kota Bandung: Studi Kasus Pekka Kota Bandung

Hasya Aulia[1], Chantika Lestari[2], Naila Fayza Haq Faqih[3], Aimar Habibi Nugraha[4], Muradi[5]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Indonesia[1,2,3,4,5]

*Email: hasya24001@mail.unpad.ac.id, chantika24001@mail.unpad.ic.id, naila24008@mail.unpad.ac.id, aimar24001@mail.unpad.ic.id, muradi@unpad.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 04-10-2026
Disetujui 26-11-2026
Diterbitkan 28-11-2026

ABSTRACT

Women as heads of households occupy a social position associated with economic responsibility, caregiving, and the need for access to empowerment programs and government support. Shared experiences do not automatically produce collective action; therefore, it is important to examine how the identity of women heads of households develops into shared interests and interacts with local government responses. This study aims to analyze the mobilization of women heads of households' identity and the response of the Bandung City Government through a case study of PEKKA in Bandung City. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews and document analysis and examined using Charles Tilly's mobilization framework, consisting of interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. The findings show that the identity of women heads of households develops into a collective identity through the formation of shared interests, PEKKA organization, assistance, resource mobilization, and the use of participatory spaces. The government response has developed from data collection, assistance, training, and empowerment toward further institutional strengthening through the PEKKA Bersinar program. The study concludes that the mobilization of PEKKA identity takes place through organizational and institutional participation, while government responses also contribute to strengthening the organization and mobilization of the group.

Keywords: *Women Heads of Households, Mobilization, PEKKA Bandung City, Identity Politics*

PENDAHULUAN

Perempuan kepala keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki posisi dan pengalaman berbeda dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain menjalankan fungsi pengasuhan, perempuan dalam posisi ini juga memikul tanggung jawab ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga. Karena itu, perempuan kepala keluarga tidak hanya dapat dipahami sebagai kategori demografis, tetapi juga sebagai kelompok yang memiliki pengalaman, persoalan, dan kepentingan yang relatif beririsan. Kuswanti et al. (2020) menunjukkan bahwa karakteristik dan komunikasi dalam kelompok PEKKA berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi anggotanya. Kesamaan posisi tersebut menjadi penting ketika berkembang menjadi kepentingan bersama dan kemudian diorganisasi dalam kelompok.

Dalam perspektif Charles Tilly (1978) dalam *From Mobilization to Revolution*, mobilisasi berkaitan dengan kemampuan kelompok untuk memperoleh dan mengaktifkan sumber daya dalam mengejar kepentingan bersama. Dengan demikian, kesamaan identitas tidak secara otomatis menghasilkan mobilisasi. Diperlukan proses pengorganisasian kepentingan, pembentukan jaringan, serta pengaktifan sumber daya yang memungkinkan kelompok melakukan tindakan kolektif. Penelitian ini menggunakan alur *interest, organization, mobilization, opportunity, collective action* untuk menganalisis bagaimana identitas sebagai perempuan kepala keluarga berkembang menjadi kapasitas kelompok untuk mengartikulasikan kepentingannya. Identitas perempuan dalam penelitian ini dipahami sebagai *ascribed identity,* tetapi fokus analisis bukan pada asal-usul identitas tersebut, melainkan pada bagaimana identitas dan pengalaman bersama diorganisasi menjadi kepentingan kolektif.

Kajian mengenai PEKKA selama ini lebih banyak menempatkan kelompok perempuan kepala keluarga dalam kerangka pemberdayaan. Kuswanti et al. (2020) membahas pemberdayaan ekonomi anggota PEKKA, sedangkan Astuti et al. (2024) mengkaji pemberdayaan PEKKA dalam kaitannya dengan resiliensi perempuan. Saharani et al. (2024) meneliti dampak koperasi simpan-pinjam PEKKA, sementara Octavia et al. (2024) membahas peningkatan kemandirian ekonomi melalui pemasaran digital. Azzahra et al. (2024) juga mengkaji pengembangan dan pemasaran produk kelompok perempuan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya organisasi dan peningkatan kapasitas, tetapi belum secara khusus melihat PEKKA melalui proses *interest, organization, mobilization, opportunity, collective action* serta hubungannya dengan pemerintah daerah.

Di Kota Bandung, perempuan kepala keluarga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bandung melalui DP3A. Pendamping Lapangan (PL) PEKKA berperan dalam mengumpulkan informasi mengenai jumlah, potensi, dan persoalan perempuan kepala keluarga serta menghubungkannya dengan pemerintah dalam perumusan program. Pemerintah juga memberikan berbagai pelatihan keterampilan, seperti menjahit, tata rias, *public speaking,* pengembangan jaringan usaha, dan pemasaran digital. Data DP3A menunjukkan bahwa jumlah perempuan kepala keluarga sekitar 183.000 orang, meskipun tidak seluruhnya berada dalam kondisi miskin. Karena itu, intervensi diarahkan tidak hanya pada bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan pendapatan (DP3A Kota Bandung, 2026).

Konteks pemberdayaan perempuan di Kota Bandung juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Peraturan daerah tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Bandung. Perda ini mengatur antara lain mengenai hak perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta pembiayaan. Dengan adanya regulasi tersebut, pemberdayaan perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai bentuk program atau kegiatan pemerintah, tetapi juga memiliki landasan kelembagaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Perda tersebut menjadi penting dalam konteks penelitian ini karena menunjukkan adanya ruang kelembagaan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok perempuan dalam menyampaikan kepentingan serta membangun hubungan dengan pemerintah daerah.

Mobilisasi juga berlangsung melalui hubungan kelompok dengan ruang pemerintahan. Rembug Warga dan Musrenbang menjadi saluran penyampaian kebutuhan masyarakat, sementara PL PEKKA dapat membawa informasi dan aspirasi perempuan kepala keluarga ke dalam proses tersebut. Perkembangan PEKKA Bersinar dan rencana Forum PEKKA menunjukkan adanya upaya pengorganisasian lebih lanjut terhadap perempuan kepala keluarga yang telah mengikuti berbagai pelatihan dan mengembangkan usaha. Namun, berdasarkan wawancara, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa PEKKA Bersinar merupakan hasil langsung tuntutan PEKKA. Fenomena tersebut lebih tepat dilihat sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan pengembangan kapasitas kelompok (DP3A Kota Bandung, 2026).

Berdasarkan kerangka Tilly (1978), kondisi tersebut menunjukkan bahwa program, pelatihan, pendampingan, informasi, jaringan, dan akses terhadap ruang pemerintahan merupakan sumber daya yang dapat tersedia bagi kelompok. Sumber daya tersebut baru memiliki makna sebagai mobilisasi ketika diaktifkan untuk mengejar kepentingan bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat apa yang diberikan pemerintah kepada perempuan kepala keluarga, tetapi bagaimana kepentingan kelompok di organisasi, sumber daya apa yang dimobilisasi, bagaimana jaringan dan organisasi berperan, serta bagaimana kepentingan tersebut diartikulasikan melalui ruang pemerintahan lokal. Pemerintah dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai pemberi program, tetapi juga sebagai aktor yang menyediakan akses dan sumber daya kelembagaan yang berhubungan dengan proses mobilisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana mobilisasi perempuan kepala keluarga melalui PEKKA di Kota Bandung dan bagaimana proses tersebut berhubungan dengan respons Pemerintah Kota Bandung? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak merumuskan hipotesis formal, melainkan argumen awal bahwa identitas sebagai perempuan kepala keluarga tidak dengan sendirinya menghasilkan mobilisasi. Identitas dan pengalaman bersama menjadi dasar mobilisasi ketika berkembang menjadi kepentingan bersama, kemudian diorganisasi melalui kelompok dan didukung oleh pengaktifan sumber daya berupa informasi, keterampilan, jaringan, pendampingan, serta akses terhadap institusi dan ruang partisipasi pemerintah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mobilisasi perempuan kepala keluarga melalui PEKKA di Kota Bandung dengan menggunakan kerangka Tilly, khususnya hubungan antara *interest, organization, mobilization, opportunity, collective action.* Penelitian ini juga menganalisis bagaimana proses tersebut berhubungan dengan respons Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, penelitian ini memandang PEKKA bukan semata sebagai kelompok sasaran pemberdayaan, tetapi sebagai kelompok sosial yang melalui organisasi dan mobilisasi dapat mengembangkan kapasitas untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam ruang pemerintahan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses mobilisasi identitas perempuan kepala keluarga, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Adapun metode studi kasus digunakan mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada satu kasus spesifik, yaitu PEKKA

Kota Bandung dalam kaitannya dengan respons kebijakan Pemerintah Kota Bandung. Pemilihan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan kepala keluarga tidak semata dapat dipandang sebagai kategori sosial, melainkan juga sebagai kelompok yang memiliki pengalaman, kepentingan, dan kebutuhan spesifik yang pada gilirannya memperoleh perhatian dari pemerintah.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, guna memperoleh gambaran mengenai cara pandang pemerintah terhadap isu perempuan kepala keluarga, bentuk pendampingan yang diberikan, serta respons kebijakan atau program yang dihasilkan. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap Pendamping Lapangan (PL) untuk memahami secara langsung proses pendampingan PEKKA yang berlangsung di lapangan.

Adapun data sekunder yang digunakan untuk melengkapi sekaligus memperkuat data primer yang telah diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup regulasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan, dokumen pemerintah, publikasi PEKKA, jurnal ilmiah, serta pemberitaan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Keberadaan data sekunder ini membantu peneliti dalam memahami konteks kebijakan, sejarah perkembangan PEKKA, sekaligus posisi perempuan kepala keluarga dalam agenda kerja pemerintah.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi dan kategorisasi data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumen terlebih dahulu dipilah sesuai kebutuhan penelitian, kemudian dikelompokkan berdasarkan lima dimensi mobilisasi yang dikemukakan Charles Tilly, yaitu *interest*, *organization*, *mobilization*, *opportunity*, dan *collective action*. Melalui proses pengelompokan tersebut, penelitian ini berupaya menafsirkan bagaimana identitas perempuan kepala keluarga berkembang menjadi kepentingan kolektif, bagaimana kepentingan tersebut kemudian dimobilisasi, serta bagaimana Pemerintah Kota Bandung memberikan respons melalui kebijakan maupun program yang dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dan penelusuran berbagai dokumen terkait PEKKA di Kota Bandung, terlihat bahwa keberadaan perempuan kepala keluarga tidak hanya berkaitan dengan penerimaan program pemberdayaan dari pemerintah, tetapi juga dengan adanya kebutuhan, kepentingan, serta keterlibatan mereka dalam hubungan dengan pemerintah. Kebutuhan yang dihadapi anggota PEKKA kemudian menjadi dasar bagi munculnya berbagai bentuk kegiatan kelompok, penyampaian aspirasi, partisipasi dalam forum, serta keterlibatan dalam program pemberdayaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses yang dapat dilihat sebagai mobilisasi kelompok, karena terdapat kepentingan yang dibawa melalui organisasi, didukung oleh sumber daya dan jaringan yang dimiliki, memanfaatkan ruang yang tersedia, dan diwujudkan melalui tindakan bersama. Untuk melihat proses tersebut secara lebih mendalam, hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka mobilisasi Charles Tilly yang terdiri atas lima dimensi, yaitu *interest, organization, mobilization, opportunity,* dan *collective action*.

1) *Interest*

Dalam kerangka mobilisasi yang dikembangkan Charles Tilly, *interest* dipahami sebagai kepentingan yang dimiliki suatu kelompok sebagai landasan bagi terbentuknya tindakan kolektif. Kepentingan ini dapat bersumber dari kebutuhan, permasalahan, atau pengalaman bersama yang dirasakan

oleh anggota kelompok tersebut. Mengacu pada kerangka ini, dimensi *interest* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan kepala keluarga di Kota Bandung diposisikan sebagai kelompok dengan kebutuhan khusus, dan bagaimana kebutuhan tersebut bertransformasi menjadi kepentingan kolektif yang direspons oleh Pemerintah Kota Bandung, salah satunya melalui penguatan program PEKKA Bersinar.

Keberadaan PEKKA sesungguhnya bukan fenomena baru di Kota Bandung. Sebagai gerakan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, PEKKA telah berkembang secara nasional sejak awal tahun 2000-an. Di Kota Bandung sendiri, perhatian terhadap kelompok ini sebenarnya sudah berjalan jauh sebelum PEKKA Bersinar diluncurkan, terutama dalam bentuk pendampingan, pendataan, dan pelatihan keterampilan. PEKKA Bersinar yaitu, Perempuan Kepala Keluarga Berdaya, Sinergi, dan Sejahtera merupakan program Pemerintah Kota Bandung yang bertujuan memperkuat kemandirian sosial dan ekonomi kelompok perempuan kepala keluarga. Program ini resmi diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 2026 dan meliputi pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta penguatan jejaring usaha. Dengan kata lain, PEKKA Bersinar tidak dapat dimaknai sebagai titik awal munculnya PEKKA, melainkan sebagai bentuk penguatan sekaligus pelembagaan atas respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan kelompok tersebut.

Kepentingan perempuan kepala keluarga di Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari posisi sosial-ekonomi mereka, yang tidak sebatas berkaitan dengan status administratif sebagai kepala keluarga, tetapi juga melekat pada peran mereka sebagai penopang utama kehidupan keluarga. Berdasarkan data sekunder Diskominfo Kota Bandung, tercatat sebanyak 183.853 kepala keluarga perempuan, atau sekitar 21,4 persen dari keseluruhan kepala keluarga di Kota Bandung. Cakupan sasaran PEKKA Bersinar pun tidak terbatas pada perempuan yang secara administratif berstatus kepala keluarga, melainkan turut menjangkau perempuan yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga meskipun masih memiliki suami. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam konteks kebijakan, kategori perempuan kepala keluarga dimaknai secara lebih luas, yakni mencakup perempuan yang menanggung beban ekonomi sekaligus sosial dalam rumah tangganya (Diskominfo Kota Bandung, 2026).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, mengungkapkan bahwa kepentingan perempuan kepala keluarga terutama berpusat pada persoalan kemandirian ekonomi, akses terhadap pekerjaan, peningkatan kapasitas, akses layanan, serta pemenuhan kebutuhan sosial. Dimensi ekonomi menjadi perhatian yang paling menonjol mengingat perempuan kepala keluarga umumnya menanggung beban ganda, yaitu menjalankan fungsi pengasuhan sekaligus berperan sebagai pencari nafkah utama. Atas dasar itu, kebutuhan kelompok PEKKA tidak semata dimaknai sebagai kebutuhan akan bantuan, melainkan sebagai kebutuhan pemberdayaan agar mereka mampu mencapai kemandirian, baik secara sosial maupun ekonomi. Kondisi ini tergambar dari pernyataan informan berikut:

Kalau kita melihat perempuan kepala keluarga, persoalannya tidak hanya persoalan ekonomi. Mereka sering mempunyai beban ganda karena harus menjalankan fungsi pengasuhan sekaligus menjadi pencari nafkah utama. Karena itu, intervensinya mulai dari pemberian keterampilan, dilanjutkan dengan pendampingan dan bantuan modal, dilakukan secara terpadu. (Kepala Bidang PKHP DP3A Kota Bandung, wawancara, 22 September 2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepentingan perempuan kepala keluarga di Kota Bandung tidak dapat direduksi semata pada persoalan ekonomi. Meskipun ekonomi menjadi fokus utama, persoalan tersebut pada praktiknya saling beririsan dengan aspek pekerjaan, pengasuhan, akses permodalan, perlindungan sosial, hingga keterhubungan dengan layanan pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan data

Diskominfo Kota Bandung yang mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, DP3A telah melatih sekitar 800–900 perempuan melalui berbagai pelatihan vokasi, serta mendata kurang lebih 3.000 perempuan kepala keluarga melalui pendamping PEKKA (Diskominfo Kota Bandung, 2026).

Persoalan yang semula dialami secara individual ternyata memperlihatkan pola yang relatif serupa di antara anggota kelompok. Sebagian besar perempuan kepala keluarga menghadapi keterbatasan akses pekerjaan, minimnya modal usaha, kebutuhan akan peningkatan keterampilan, sekaligus tanggung jawab domestik yang harus dijalankan bersamaan dengan peran ekonomi. Dalam perspektif politik identitas, kesamaan pengalaman sebagai perempuan kepala keluarga inilah yang menjadi fondasi terbentuknya kepentingan kolektif PEKKA di Kota Bandung. Merujuk pada pemikiran Tilly, *interest* dengan demikian menjadi titik tolak mobilisasi, sebab kelompok telah memiliki pijakan yang jelas mengenai persoalan yang dihadapi, bentuk dukungan yang diperlukan, maupun kepentingan yang hendak diperjuangkan dalam relasinya dengan Pemerintah Kota Bandung.

2) *Organization*

Dalam kerangka mobilisasi Charles Tilly (1978), *organization* merupakan unsur penting yang menghubungkan individu-individu yang memiliki kepentingan bersama ke dalam hubungan yang lebih terstruktur. Organisasi memungkinkan individu untuk memiliki pembagian peran, hubungan antaranggota, serta saluran komunikasi yang mendukung koordinasi dalam mencapai kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, dimensi *organization* digunakan untuk melihat bagaimana perempuan kepala keluarga di Kota Bandung yang memiliki pengalaman dan kebutuhan yang relatif sama dihimpun ke dalam kelompok PEKKA, kemudian membentuk struktur, pembagian peran, dan komunikasi yang memungkinkan kepentingan tersebut dikelola secara bersama.

Pengorganisasian perempuan kepala keluarga di Kota Bandung terlihat dari terbentuknya kelompok yang tidak hanya menghimpun anggota berdasarkan kesamaan kondisi, tetapi juga memiliki struktur dan pembagian tugas. Berdasarkan struktur kelompok PEKKA, terdapat Ketua, Tini Gustini, dan Wakil Ketua, Nia Yuniasari, yang berperan dalam mengarahkan kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Dalam bidang administrasi terdapat Sekretaris, R. Yanti Rafianti, dan Wakil Sekretaris, Najma Aulia. Sementara itu, Penanggung Jawab Produk diisi oleh Nia Yuniasari dan Ida Nuraida yang berfokus pada produksi dan kualitas produk. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Bendahara, Ai Saidah, dan Wakil Bendahara, Wiwin Winarshi. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian kelompok PEKKA tidak berhenti pada penghimpunan perempuan kepala keluarga, tetapi juga membentuk pembagian fungsi yang memungkinkan anggota menjalankan peran yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Struktur tersebut didukung oleh nilai Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh yang menekankan sikap saling belajar, peduli, dan membimbing antaranggota.

Keanggotaan kelompok PEKKA berasal dari perempuan kepala keluarga yang memiliki kebutuhan dan persoalan yang beragam, seperti kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian. Perempuan kepala keluarga terlebih dahulu diidentifikasi dan didata untuk mengenali kelompok yang menjadi sasaran pemberdayaan. Setelah bergabung, anggota tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kegiatan, tetapi menjadi bagian dari kelompok yang memiliki struktur, pembagian peran, dan kegiatan bersama. Anggota kemudian memperoleh pendampingan melalui sosialisasi, pelatihan keterampilan atau vokasional, pengembangan usaha, bantuan permodalan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, proses pengorganisasian tidak berhenti pada pendataan, tetapi berkembang melalui kegiatan yang membangun kapasitas dan hubungan antaranggota.

Selain melalui struktur dan keanggotaan, pengorganisasian juga terlihat dari adanya komunikasi antaranggota dan dengan pihak di luar kelompok. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan kelompok, koordinasi antaranggota, penyampaian informasi kegiatan, serta komunikasi dengan Pendamping Lapangan (PL) dan pihak terkait. Melalui saluran tersebut, anggota dapat menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi, sementara informasi mengenai kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan program lainnya dapat diteruskan kepada anggota. Kebutuhan dan aspirasi anggota juga dapat dihimpun untuk disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Dengan demikian, komunikasi dalam kelompok tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi saluran yang menghubungkan kebutuhan anggota dengan pihak pemerintah.

Dalam hubungan tersebut, Pendamping Lapangan (PL) memiliki peran sebagai pendamping, penghubung, fasilitator, dan penyampai informasi. Sebagai pendamping, PL membantu anggota memahami dan mengikuti kegiatan pemberdayaan. Sebagai penghubung, PL menjembatani komunikasi antara anggota atau kelompok PEKKA dengan pihak pemerintah. PL juga memfasilitasi akses anggota terhadap informasi mengenai pelatihan, pengembangan usaha, layanan, dan kegiatan pemberdayaan, sekaligus membantu meneruskan kebutuhan anggota kepada pihak terkait. Hal ini sejalan dengan keterangan informan dari DP3A bahwa, "kelompok seperti PEKKA bukan hanya penerima program, tetapi dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian kelompok PEKKA tidak hanya membangun hubungan internal antaranggota, tetapi juga membentuk saluran hubungan dengan pemerintah.

Pengorganisasian tersebut berlangsung dalam konteks adanya PEKKA Bersinar sebagai program pemberdayaan Pemerintah Kota Bandung. Program tersebut menjadi salah satu bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan perempuan kepala keluarga melalui kegiatan pemberdayaan, sementara kelompok PEKKA menjadi wadah yang menghimpun anggota dan menyampaikan kebutuhan mereka dalam proses tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif Tilly, *organization* menunjukkan proses perubahan dari perempuan kepala keluarga yang sebelumnya tersebar sebagai individu menjadi kelompok yang memiliki struktur, pembagian peran, hubungan antaranggota, dan saluran komunikasi. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi kelompok untuk mengelola kepentingan bersama dan terlibat dalam proses mobilisasi.

3) *Mobilization*

Mobilisasi pada teori mobilisasi Charles Tilly (1978) dipandang sebagai proses ketika suatu kelompok memperoleh dan mengaktifkan sumber daya untuk mengejar kepentingan bersama. Mobilisasi karena itu tidak hanya menunjukkan keberadaan suatu kelompok, tetapi menjelaskan bagaimana sumber daya yang tersedia dapat dikendalikan dan digunakan untuk melakukan tindakan kolektif. Dalam konteks perempuan kepala keluarga di Kota Bandung, proses tersebut dapat dilihat dari keterhubungan antara kepentingan perempuan kepala keluarga, pengorganisasian PEKKA, sumber daya yang tersedia, serta akses terhadap institusi pemerintahan. Posisi sebagai perempuan kepala keluarga menghadirkan kebutuhan dan kepentingan tertentu, terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi, peningkatan pendapatan, keterampilan, dan akses terhadap program pemberdayaan. Kepentingan tersebut kemudian memperoleh saluran melalui keberadaan kelompok PEKKA dan Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga (PL PEKKA).

Pada aspek organisasi, keberadaan PL PEKKA menjadi penting karena menghubungkan perempuan kepala keluarga dengan sumber daya dan institusi yang lebih luas. Berdasarkan wawancara dengan DP3A Kota Bandung, PL PEKKA melakukan pendataan mengenai jumlah, potensi, serta permasalahan perempuan kepala keluarga di Kota Bandung. PL juga memiliki informasi mengenai

kebutuhan perempuan kepala keluarga di berbagai wilayah dan bekerja bersama Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun program pemberdayaan. Dalam perspektif Tilly (1978), informasi dan jaringan tersebut dapat dipahami sebagai sumber daya yang memungkinkan kepentingan kelompok tidak berhenti pada tingkat individual, tetapi dapat diorganisasi dan diartikulasikan secara lebih kolektif. Dengan demikian, PL PEKKA tidak hanya menjalankan fungsi pendampingan, tetapi juga menjadi penghubung yang memungkinkan kelompok memperoleh akses terhadap sumber daya dan institusi pemerintahan.

Proses mobilisasi kemudian terlihat dari cara kepentingan perempuan kepala keluarga dibawa ke dalam ruang pemerintahan. DP3A menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui Rembug Warga pada tingkat RT/RW dan kemudian diteruskan melalui Musrenbang kelurahan, kecamatan, forum gabungan perangkat daerah, hingga tingkat kota. PL PEKKA, dengan data dan pengetahuan mengenai kebutuhan perempuan kepala keluarga, dapat menyampaikan aspirasi tersebut melalui mekanisme tersebut. Selain itu, terdapat jalur melalui reses anggota DPRD yang juga dapat menjadi ruang penyampaian permasalahan dan usulan masyarakat. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi berlangsung melalui penggunaan jaringan dan akses kelembagaan untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok. Dengan kata lain, sumber daya berupa informasi, pendampingan, dan jaringan kelembagaan tidak hanya dimiliki, tetapi digunakan untuk membawa kepentingan perempuan kepala keluarga ke dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Mobilisasi sumber daya juga terlihat melalui peningkatan kapasitas anggota. DP3A memberikan berbagai pelatihan, baik vokasional seperti menjahit dan tata rias maupun non vokasional seperti *public speaking*, jejaring usaha, dan pemasaran digital. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pelatihan digital diarahkan agar perempuan kepala keluarga mampu memasarkan produk melalui media sosial, bahkan terdapat produk yang telah menjangkau pasar di luar daerah dan luar negeri. Dalam kerangka Tilly, keterampilan tersebut dapat dilihat sebagai sumber daya yang meningkatkan kapasitas anggota untuk bertindak. Namun, pelatihan itu sendiri belum dapat disebut sebagai mobilisasi. Mobilisasi terjadi ketika pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan akses yang diperoleh tersebut dapat digunakan oleh anggota atau kelompok untuk mengejar kepentingan bersama.

Pengorganisasian lebih lanjut terlihat dalam pengembangan PEKKA Bersinar. Berdasarkan wawancara, setelah berbagai pelatihan menghasilkan sejumlah perempuan kepala keluarga yang telah memiliki usaha, terdapat arahan untuk mengorganisasi mereka agar pemberdayaan tidak hanya bergantung pada stimulan pemerintah. PEKKA Bersinar kemudian dikembangkan sebagai kemasan program yang diharapkan dapat tumbuh menjadi Forum PEKKA. Forum tersebut direncanakan beranggotakan pengurus PEKKA dan koordinator PEKKA di tingkat kecamatan, sementara akademisi, dunia usaha, dan media diharapkan memberikan penguatan dari luar forum. Dengan itu, terdapat upaya mengubah sumber daya individual yang telah terbentuk melalui pelatihan menjadi kapasitas organisasi yang lebih terstruktur.

4) *Opportunity*

Opportunity atau kesempatan menurut Tilly (1978) dapat dipahami sebagai kondisi di luar kelompok yang memberikan ruang bagi kelompok untuk menyampaikan kepentingan dan melakukan tindakan bersama. O*pportunity* tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kesempatan, tetapi melihat juga apakah lingkungan politik dan pemerintahan dapat memberikan akses bagi kelompok untuk berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan. Dalam konteks PEKKA di Kota Bandung, kesempatan tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan yang memberikan ruang bagi perempuan, tersedianya mekanisme partisipasi, serta adanya hubungan kelembagaan antara PEKKA dengan pemerintah. Adanya kondisi tersebut menjadi penting karena kepentingan yang dimiliki PEKKA tidak cukup hanya dibicarakan di dalam kelompok, tetapi membutuhkan ruang agar dapat disampaikan dan

dipertimbangkan dalam proses pemerintahan.

Ruang tersebut ada didukung oleh adanya kebijakan dan kelembagaan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3A, salah satu landasan yang saat ini digunakan untuk memperkuat isu perempuan adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Selain itu, terdapat kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Pokja PUG dan *Focal Point* PUG Kota Bandung. Dalam wawancara juga dijelaskan bahwa isu PEKKA tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi dapat ditempatkan dalam isu kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga, dan pembangunan daerah. Perhatian pemerintah terhadap PEKKA sendiri sebenarnya sudah berlangsung sebelum adanya program PEKKA Bersinar di mana terdapat penelitian mengenai pemberdayaan kelompok PEKKA di Kota Bandung yang mencatat bahwa program pemberdayaan telah dilaksanakan sejak 2017 dan melibatkan DP3A serta berbagai pihak dalam pelaksanaannya. (Fadlah, Nur Alfi Laili. 2023)

Kesempatan tersebut kemudian terlihat dalam adanya mekanisme partisipasi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, PEKKA dapat terlibat mulai dari proses perencanaan melalui Rembug Warga sampai dengan Musrenbang Kota, bahkan keterlibatan tersebut menurut informan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat berlanjut sampai monitoring dan evaluasi. Dalam prosesnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui forum pertemuan kelompok, sosialisasi, pendampingan, pelatihan, konsultasi program maupun penyampaian aspirasi secara langsung. Ketika kebutuhan yang disampaikan PEKKA berkaitan dengan bidang lain, aspirasi tersebut dapat diarahkan kepada perangkat daerah atau mitra yang memiliki kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa forum yang tersedia tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan usulan saja, tetapi juga menjadi pintu koordinasi antara PEKKA dengan berbagai perangkat daerah. Selain itu, Federasi PEKKA juga menempatkan forum, pengembangan jaringan, lobi kepada pemerintah, dan dialog dengan pemerintah sebagai bagian dari kegiatan organisasinya.

Berdasarkan keterangan DP3A, ketika PEKKA menyampaikan aspirasi, pemerintah terlebih dahulu melihat apakah persoalan tersebut merupakan kewenangan DP3A atau menjadi kewenangan perangkat daerah lainnya. Setelah itu dilakukan identifikasi masalah, verifikasi data, penentuan kewenangan, koordinasi, kemudian baru diarahkan ke program atau kegiatan yang sesuai dan dilanjutkan dengan monitoring serta evaluasi. Dengan demikian, tidak semua aspirasi dapat langsung diterjemahkan menjadi program dari ranah DP3A. Selain itu, masih terdapat juga beberapa tantangan, seperti data PEKKA yang harus terus diperbarui, adanya fragmentasi kewenangan karena persoalan PEKKA bersifat lintas sektor, keterbatasan anggaran, keberlanjutan program setelah pelatihan selesai, dan akses terhadap pasar. Adanya kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan politik yang dimiliki PEKKA memang terbuka, tetapi tetap dipengaruhi oleh mekanisme dari pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menindaklanjutinya.

5) *Collective action*

Dimensi terakhir dalam kerangka Charles Tilly (1978) yaitu *collective action* atau tindakan kolektif merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu dan kemudian bertindak secara bersama. Jadi, yang dilihat bukan hanya apa masalah yang mereka hadapi saja, tetapi apa yang mereka lakukan bersama karena memiliki kepentingan yang sama. Dalam konteks PEKKA Kota Bandung, tindakan kolektif dapat dilihat dari bagaimana perempuan kepala keluarga tidak hanya menghadapi persoalan secara individu, tetapi membicarakan dan menghimpun kebutuhan tersebut melalui kelompok untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, anggota

PEKKA dapat melakukan pertemuan dan diskusi kelompok, menyampaikan kebutuhan dan aspirasi, mengikuti forum partisipasi masyarakat, serta menyampaikan aspirasi melalui pendamping lapangan.

Adanya ruang tersebut kemudian memungkinkan PEKKA melakukan berbagai tindakan secara bersama untuk menyampaikan kebutuhan kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, tindakan PEKKA dimulai dari pertemuan dan diskusi kelompok untuk membicarakan kebutuhan anggota, lalu aspirasi yang muncul tidak langsung disampaikan secara individual, tetapi terlebih dahulu dibahas dan dijaring agar dapat diketahui kebutuhan yang dianggap penting dan dijadikan prioritas oleh kelompok. Setelah itu, aspirasi disampaikan melalui pendamping lapangan maupun forum yang tersedia. Dalam proses tersebut, anggota PEKKA juga mengikuti berbagai kegiatan seperti pertemuan kelompok, sosialisasi, pelatihan, konsultasi program, serta forum yang berkaitan dengan perencanaan dan pemberdayaan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan PEKKA bukan hanya aktivitas individu, tetapi terdapat proses mengumpulkan kebutuhan dan menyatukannya menjadi kepentingan kelompok.

Salah satu bentuk *collective action* yang cukup jelas terlihat dari proses menghimpun data dan kebutuhan anggota untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, ketika terdapat anggota PEKKA yang membutuhkan dukungan tertentu, termasuk anggota dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan, kebutuhan tersebut terlebih dahulu diidentifikasi dan didata. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengajukan atau mengarahkan anggota kepada program maupun bantuan yang sesuai. Dalam prosesnya, pendamping lapangan membantu menghubungkan kelompok atau bisa disebut sebagai koordinator dengan pemerintah dan pihak lain yang memiliki kewenangan. Adanya pola ini menunjukkan tindakan bersama karena persoalan yang awalnya dialami oleh masing-masing perempuan kepala keluarga kemudian dikumpulkan menjadi kebutuhan kelompok dan dibawa melalui jalur yang dapat diakses.

Selain menyampaikan aspirasi, tindakan bersama juga dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Anggota PEKKA mengikuti pelatihan dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam bidang usaha maupun keterampilan pribadi. Hasil penelitian dari Fadlah, Nur Alfi Laili. (2023) tentang PEKKA di Kota Bandung menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan telah mencakup pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, bantuan modal, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi perempuan kepala keluarga dalam mengembangkan usaha maupun kualitas diri. Sementara itu, dalam organisasi PEKKA secara lebih luas, kegiatan kelompok juga diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan, pengembangan jaringan, forum perempuan, serta dialog dengan pemerintah.

Respons Kebijakan Pemerintah Kota Bandung

Perhatian Pemerintah Kota Bandung terhadap perempuan kepala keluarga sebenarnya telah berlangsung sebelum adanya program PEKKA Bersinar. Berdasarkan penelitian dari Fadlah, Nur Alfi Laili. (2023) mengenai pemberdayaan kelompok PEKKA di Kota Bandung, program pemberdayaan PEKKA telah dilaksanakan sejak tahun 2017, meskipun pada awalnya masih bersifat tentatif dan dilaksanakan pada momentum tertentu di hari besar seperti Hari Kartini, Hari Perempuan, dan Hari Ibu. Dalam pelaksanaannya, DP3A juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada perempuan kepala keluarga. Bentuk perhatian tersebut kemudian berkembang melalui berbagai kegiatan seperti pendataan, pendampingan, pelatihan keterampilan, bimbingan teknis, pengembangan usaha, hingga pemberian dukungan permodalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3A, pendamping lapangan memiliki peran dalam membantu menghubungkan anggota PEKKA dengan pemerintah, mulai dari pendataan kebutuhan sampai dengan penyampaian aspirasi dan pengajuan

dukungan. Maka, *respons* pemerintah juga terhadap PEKKA tidak hanya dilakukan hanya dalam bentuk bantuan, tetapi juga melalui upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian perempuan kepala keluarga.

Dalam pelaksanaannya, DP3A menyediakan beberapa bentuk dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan kepala keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan tersebut meliputi pelatihan keterampilan atau vokasional, seperti memasak, menjahit, tata rias, dan *fashion*, yang dapat disertai dengan pemberian alat pendukung sesuai dengan bidang pelatihan. Selain keterampilan teknis, terdapat pula kegiatan nonvokasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan diri, seperti *public speaking* dan pengembangan keterampilan personal. DP3A juga melakukan pendampingan, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, pemasaran, penguatan kelompok PEKKA, serta memfasilitasi akses terhadap permodalan. Dalam hal dukungan ekonomi, pemerintah juga membangun kerja sama dengan pihak lain seperti BAZNAS yang memberikan hibah kepada perempuan kepala keluarga yang berada pada desil 1-4. Berdasarkan keterangan informan, anggota PEKKA yang memiliki kebutuhan dan kondisi ekonomi tertentu terlebih dahulu didata dan diverifikasi sebelum diarahkan untuk memperoleh dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa *respons* pemerintah tidak hanya berhenti pada pemberian pelatihan saja, tetapi juga berusaha menghubungkan pelatihan dengan pengembangan usaha dan adanya dukungan ekonomi.

Respons tersebut kemudian semakin diperkuat melalui peluncuran program PEKKA Bersinar (Perempuan Kepala Keluarga Berdaya, Sinergi, dan Sejahtera) pada 21 April 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat keberdayaan sosial dan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui pelatihan, pengembangan jejaring, pemetaan potensi usaha, pembentukan kelompok usaha, serta fasilitasi legalitas dan pengembangan usaha. Sebelum peluncuran PEKKA Bersinar, DP3A juga telah melaksanakan berbagai pelatihan bagi perempuan kepala keluarga dalam beberapa tahun sebelumnya. Pada saat peluncuran, program tersebut dikembangkan dengan membentuk jejaring PEKKA dan mendorong terbentuknya kelompok usaha di setiap kecamatan. Peserta tidak hanya mendapatkan materi pelatihan, tetapi juga memperoleh dukungan berupa alat atau perlengkapan yang sesuai dengan bidang kegiatan serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, program diarahkan untuk memperkuat jejaring antara PEKKA, pemerintah, dan pihak lain yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi perempuan kepala keluarga.

Jika dilihat dari perkembangannya, *respons* Pemerintah Kota Bandung terhadap PEKKA menunjukkan adanya proses pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah sebelumnya telah memberikan perhatian melalui pendataan, pendampingan, pelatihan, penguatan kelompok dan bantuan modal, kemudian pada tahun 2026 dukungan tersebut dikembangkan dan dikemas melalui PEKKA Bersinar. Berdasarkan hasil wawancara, DP3A juga menyampaikan bahwa ke depan pemberdayaan PEKKA perlu diarahkan dari pola bantuan atau *charity* menuju pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Arah tersebut mencakup penguatan data PEKKA, peningkatan kemandirian ekonomi, penguatan perlindungan dan akses pelayanan, penguatan organisasi PEKKA, serta memasukkan isu perempuan kepala keluarga ke dalam pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa tantangan, seperti kebutuhan untuk memperbarui data secara terus-menerus, kewenangan yang tersebar pada berbagai perangkat daerah, keterbatasan anggaran, keberlanjutan program setelah pelatihan, dan akses terhadap pasar. Adanya *respons* pemerintah terhadap PEKKA dapat dipahami bukan sebagai *respons* yang baru muncul melalui PEKKA Bersinar, tetapi sebagai perkembangan dari perhatian dan program pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya. PEKKA Bersinar ini menjadi salah satu bentuk penguatan dan pengembangan *respons* tersebut dengan memberikan arah yang lebih terstruktur pada peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, jejaring, dan keberlanjutan pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana mobilisasi identitas perempuan kepala keluarga dan respons kebijakan Pemerintah Kota Bandung berlangsung melalui studi kasus PEKKA Kota Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa identitas sebagai perempuan kepala keluarga, yang pada mulanya melekat secara individual sebagai status sosial-ekonomi, mengalami proses transformasi menjadi identitas kolektif melalui rangkaian tahapan yang saling berkaitan, yaitu pembentukan kepentingan bersama, pengorganisasian dan pendampingan, mobilisasi sumber daya, pemanfaatan ruang partisipasi, hingga interaksinya dengan respons kebijakan pemerintah daerah.

Kota Bandung mencatat bahwa terdapat 183.853 perempuan yang merupakan kepala keluarga atau sekitar 21,4 persen dari seluruh kepala keluarga, pada dasarnya bersifat administratif dan personal. Kesamaan pengalaman dalam menanggung beban ganda, sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah utama, membuat identitas tersebut tidak lagi berhenti sebagai atribut individu, melainkan berkembang menjadi kepentingan bersama yang dirasakan lintas anggota. Proses inilah yang menjadi titik awal bagi identitas perempuan kepala keluarga untuk memperoleh makna kolektif, sejalan dengan argumen awal penelitian bahwa identitas yang semula melekat dapat berubah menjadi identitas kolektif ketika dibentuk melalui pengalaman bersama dan kepentingan yang sama.

Perubahan makna identitas tersebut tidak berlangsung dengan sendirinya, melainkan difasilitasi oleh pengorganisasian dan pendampingan. Pelembagaan PEKKA Bersinar melalui struktur kepengurusan yang jelas, serta keberadaan Pendamping Lapangan sebagai penghubung antara anggota dan pemerintah, menunjukkan bahwa identitas kolektif perempuan kepala keluarga memperoleh wadah konkret untuk diorganisasi. Melalui wadah ini, kebutuhan yang semula tersebar dan dialami secara individual dapat dihimpun, dibicarakan, dan diproses menjadi kepentingan kelompok yang lebih terstruktur.

Identitas dan kepentingan kolektif yang telah terorganisasi tersebut selanjutnya menjadi basis bagi mobilisasi, yaitu ketika informasi, keterampilan, dan jaringan kelembagaan yang dimiliki kelompok benar-benar diaktifkan untuk mengejar kepentingan bersama. Dalam prosesnya, identitas kolektif ini disalurkan ke dalam ruang partisipasi pembangunan yang tersedia, mulai dari Rembug Warga di tingkat RT/RW, Musrenbang kelurahan hingga kota, sampai jalur reses anggota DPRD. Ruang partisipasi tersebut didukung oleh landasan kebijakan formal, khususnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta kelembagaan Pengarusutamaan Gender, meskipun tetap dibatasi oleh mekanisme verifikasi data, penentuan kewenangan, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mobilisasi identitas PEKKA berlangsung melalui jalur partisipatif dan kelembagaan, bukan melalui tindakan yang bersifat konfrontatif terhadap pemerintah.

Respons pemerintah Kota Bandung terhadap proses mobilisasi identitas tersebut tidak muncul secara tiba-tiba melalui PEKKA Bersinar, melainkan merupakan kelanjutan dari perhatian yang telah berjalan sejak tahun 2017, meskipun pada masa-masa awal masih bersifat tentatif dan terikat pada momentum peringatan hari besar. Peluncuran PEKKA Bersinar pada 21 April 2026 menandai titik pelembagaan, di mana respons pemerintah yang sebelumnya parsial dikemas menjadi program yang lebih terstruktur, mencakup pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan penguatan jejaring. Dengan demikian, hubungan antara identitas kolektif PEKKA dan kebijakan pemerintah daerah bersifat dua arah, yakni identitas kolektif yang terorganisasi mendorong pemerintah untuk merespons secara lebih terlembaga, sementara respons kebijakan tersebut pada gilirannya turut memperkuat proses pengorganisasian dan mobilisasi identitas kelompok.

Penelitian ini menegaskan bahwa mobilisasi identitas perempuan kepala keluarga di Kota Bandung

merupakan proses yang berlapis, dimulai dari identitas yang melekat secara individual, berkembang menjadi kepentingan bersama melalui pengalaman kolektif, diorganisasi melalui struktur dan pendampingan, dimobilisasi melalui aktivasi sumber daya, disalurkan melalui ruang partisipasi pembangunan, dan akhirnya berinteraksi dengan respons kebijakan Pemerintah Kota Bandung. Temuan ini memperluas kajian mengenai PEKKA yang selama ini lebih banyak didekati dari sisi pemberdayaan sosial-ekonomi, dengan menunjukkan bahwa kelompok perempuan kepala keluarga juga dapat dipahami sebagai aktor kolektif yang terbentuk melalui proses politik identitas dan membangun relasi tertentu dengan institusi pemerintah di tingkat lokal. Meski demikian, keberlanjutan proses ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti kebutuhan pembaruan data secara berkala, fragmentasi kewenangan lintas sektor, keterbatasan anggaran, serta keberlanjutan program setelah masa pelatihan berakhir, yang menjadi catatan penting bagi konsistensi respons kebijakan pemerintah daerah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, F., Melani, A., & Muslimah, T. (2024). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) "pekka" melalui pengembangan dan pemasaran produk unggulan di desa cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. *Jurnal Budiman: Pembangunan Dan Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *2*(1), 25–32. https://doi.org/10.35706/budiman.v2i1.11436

Fadlah (2023). *Pemberdayaan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) : Studi tentang potensi, tantangan, dan masalah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di DP3A Kota Bandung*. Retrieved https://digilib.uinsgd.ac.id/71943

Kuswanti, A., Saleh, A., Vitayala, A., & Herien Puspitawati. (2020). Effects of communication and characteristics in Pekka groups on the economic empowerment of members. *Jurnal The Messenger*, *12*(2), 152–152. https://doi.org/10.26623/themessenger.v12i2.2389

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of Contention. *Cambridge University Press*. https://doi.org/10.1017/cbo9780511805431

Menguak Keberadaan Dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga | the SMERU Research Institute. (2026). Smeru.Or.Id. https://smeru.or.id/id/publication-id/menguak-keberadaan-dan-kehidupan-perempuan-kepala-keluarga

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) tunon terhadap resiliensi perempuan di kabupaten gianyar | citizen charter. (2024). Unud.Ac.Id. https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/115259

Pemerintah Kota Bandung – DP3A. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3A Kota Bandung Tahun 2021*. . Retrieved https://multisite.bandung.go.id/dp3a/wp-content/uploads/sites/116/2023/08/LKIP-DP3A-KOTA-BANDUNG-TAHUN-2021.pdf

Saharani, D. R., Walaseci, D. L., Maulida, S., Puteri, A., Laura Hapsari, N. M., & Suprapto, M. F. (2024). Evaluasi Dampak TERHADAP program 'Koperasi Simpan-Pinjam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).' *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, *4*(1), 155–173. https://doi.org/10.21009/saskara.041.04

Sakila, H. Y. (2024, April 29). *Strategi pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi melalui kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) : Penelitian di DP3A Kota Bandung - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Uinsgd.Ac.Id. https://digilib.uinsgd.ac.id/87085

Santi Octavia, Puji Rahayu, & Sri Setiawati. (2024). Strategi peningkatan Kemandirian Ekonomi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melalui pemasaran digital di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*, *13*(3). https://jmrbi.stiembi.ac.id/index.php/lppm/article/view/135

Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. McGraw-Hill. https://books.google.co.id/books/about/From_Mobilization_to_Revolution.html?id=oaggAQAAIAAJ&redir_esc=y

Tuvaona, Fransisco Xaverio Museng. (2018). *Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Mawar di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.* Retrieved https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/6435

JDIH Kota Bandung. *Mekanisme E-Musrenbang Kota Bandung.* Retrieved https://jdih.bandung.go.id/media/2771

Pemerintah Kota Bandung. *Renja Kecamatan Sumur Bandung.* Retrieved https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-sumur-bandung/wp-content/uploads/sites/86/2025/06/Renja-2024-KEC.-SUMUR-BANDUNG.pdf

Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2025. *Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan*. Retrieved https://peraturan.bpk.go.id/Details/325279/perda-kota-bandung-no-7-tahun-2025

Perwal Kota Bandung No. 56 Tahun 2022.. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Retrieved https://peraturan.bpk.go.id/Details/228721/perwali-kota-bandung-no-56-tahun-2022

PP no. 45 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - jdih bpk. (2017). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64699/pp-no-45-tahun-2017

BAZNAS Kota Bandung. *Mendukung Program P2WKSS, BAZNAS Kota Bandung Berdayakan Perempuan Produktif.* Retrieved https://kotabandung.baznas.go.id/news-show/mendukung-program-P2WKSS-BAZNAS-Kota-Bandung-berdayakan-perempuan-produktif/7374

Federasi PEKKA. (2021, May 14). Federasi PEKKA. https://federasipekka.or.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Perempuan Kepala Keluarga di Bandung Dapat Modal Usaha hingga Rp2 Juta.* Retrieved https://jabarprov.go.id/berita/perempuan-kepala-keluarga-di-bandung-dapat-modal-usaha-hingga-rp2-juta-18568

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2026). *Pemkot Bandung Luncurkan PEKKA Bersinar, Perkuat Kemandirian Ibu Kepala Keluarga.* Retrieved https://jabarprov.go.id/berita/pemkot-bandung-luncurkan-pekka-bersinar-perkuat-kemandirian-ibu-kepala-keluarga-23878